

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BALAI
PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
SULAWESI SELATAN
(BPPW SULSEL)**

Diajukan Oleh :
Adinda Annisaa Tobo
4517013023



**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada
Penyusunan Laporan Keuangan Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Adinda Annisaa Tobo
Stambuk/NIM : 4517013023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Tempat Penelitian : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi
Selatan (BPPW SUL-SEL)

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Thanwain, SE, M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dan Bisnis Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. H.A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., S.H., M.H

Dr. Firman Menne, S.E., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISINILAI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Adinda Annisaa Tobo
Stambuk/NIM : 4517013023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada
Penyusunan Laporan Keuangan Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada pemaksaan sama sekali.

Makassar, 2 Mei 2021

Yang bersangkutan,



Adinda Annisaa Tobo

**STANDARDS FOR APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING ON THE
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF SETTLEMENT
INFRASTRUCTURE CENTER (BPPW) SOUTH SULAWESI**

By:

ADINDA ANNISAA TOBO

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

ADINDA ANNISAA TOBO 2021. Thesis on the Application of Government Accounting Standards in the Preparation of Financial Reports for the Regional Settlement Infrastructure Center (BPPW) of South Sulawesi was bombed by Thanwain SE., M.Si Selaku and Dr. Fiman Menne SE., M.Si., Ak., CA.

The purpose of the study was to determine the application of financial accounting standards in the preparation of financial statements at the Regional Settlement Infrastructure Center (BPPW) of South Sulawesi.

The object of research is the Government Accounting Standards and Financial Reports of the Regional Settlement Center (BPPW) of South Sulawesi. The analytical tool used is qualitative analysis.

The results of the study indicate that the Regional Settlement Infrastructure Center (BPPW) of South Sulawesi has implemented or followed Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and is in accordance with the preparation of financial statements. An indicator of the application of government accounting standards is that regulations must comply with policies.

Keywords: *Implementation of Government Accounting Standards, Preparation of Financial Statements.*

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
(BPPW) SULAWESI SELATAN**

Oleh:

ADINDA ANNISAA TOBO

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

ADINDA ANNISAA TOBO 2021. Skripsi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Penyusunan Laporan Keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan di bombing oleh Thanwain SE., M.Si Selaku dan Dr. Fiman Menne SE., M.Si., Ak., CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan.

Objek penelitian adalah Standar Akuntansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan telah menerapkan atau mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan sesuai dengan penyusunan laporan keuangan. Indikator dari penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu regulasi harus sesuai dengan kebijakan.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Untaian puji syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini Merupakan Tugas Akhir Untuk Mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, dengan Berjudul “PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN”

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini,

1. Bapak Prof Dr. Ir. H. M Saleh Pallu, M. Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah menyediakan sarana dan fasilitas selama penulis menempuh proses Pendidikan.
2. Bapak Dr. H. A Arifuddin Mane. SE., M.Si., SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu bakar SE., MM Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Bosowa.
5. dan Bapak Dr. Fiman Menne SE., M.Si., Ak., CA Selaku Pembimbing I dan Bapak Thanwain SE., M.Si Selaku Pembimbing II yang tulus dan sabar bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sarana petunjuk serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu Pendidikan sehingga wawasan penulis bisa bertambah.
7. Pimpinan instansi yang terhormat Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel Dr. Ir. H. Ahmad Asiri, M.Si beserta staf-stafnya yang bersedia memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi ini.

8. Ayahanda Herman Tobo ST., M.Si dan Ibunda alm Hj. Hariani Gaus ST., M.Si, Ibunda Andi Niken Ayu Aztika SE, Nenek tersayang Hj. Bunga tercinta atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.
9. Kakak tersayang Lettu Ckm (K) dr. Putri Amanda Tobo dan dr. Gadis Sabrina Tobo, adik tersayang Zana Zebadia Tobo, Sepupu tersayang Sitti Khadijah Amaliah S atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat dan teman-temanku Iien Rohmatun Nisa, Anna Lestari, Nur Indah Astuti Pajar, Utami Ningsih, Unna, Mega Awalia, Windasari, Nurhayati yang selalu mendukung, mendoakan dan membantu saat pembuatan skripsi ini. Yang selalu memberi semangat.
11. Rekan-rekan Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi angkatan 2017, atas segala bantuan dan kerjasamanya.
12. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Amiin

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Penulis juga menyadari masih adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan sehingga tidak menutup adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dibuat dalam tugas akhir ini.

Makassar, 5 Juni 2021

Penulis

Adinda Annisaa Tobo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	6
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi.....	6
2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan.....	8
2.1.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	10
2.1.1.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	14
2.1.1.5 Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	15
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah.....	19
2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	19
2.1.2.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah.....	21
2.1.2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.....	22
2.1.2.4 Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah.....	26
2.1.2.5 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah.....	27
2.2 Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	36
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36

3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3.1 Jenis Data.....	37
3.3.2 Sumber Data.....	37
3.4 Metode Analisis.....	38
3.5 Definisi Operasional.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	41
4.1.1 Sejarah Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	41
4.1.2 Tugas Dan Fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	43
4.1.3 Kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	43
4.1.4 Visi dan Misi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	44
4.1.5 Lokasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	46
4.1.6 Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	46
4.2 Deskripsi Data.....	47
4.3 Proses Wawancara.....	48
4.4 Hasil <i>Interview</i>	49
4.4.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	49
4.4.1.1 Wawancara Dengan Pegawai I.....	49
4.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan.....	53
4.4.2.1 Wawancara Dengan Pegawai II.....	53
4.5 Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Lokasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	46
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang ilmu akuntansi yang memiliki peran dalam pencatatan serta dalam pelaporan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dikenal dengan Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan bidang ilmunya, Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat di bedakan lagi kepentingannya dalam pencatatan transaksi-transaksi adanya tuntutan akuntabilitas dan transparasi atas pelaporan kinerja pemerintahan yang dikerjakan oleh pihak yang sangat berkepentingan. Dalam pengelolaan public akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik yakni meliputi tata kelola keuangan pusat, keuangan daerah, maupun desa. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berpusat dalam prinsip akuntabilitas serta transparasi pengelolaan keuangan public yang merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga bertanggungjawab terhadap pada daerah seperti contohnya desa yang merupakan suatu unit dalam organisasi pemerintah pusat yang dihadapkan langsung dengan masyarakat yang memiliki organisasi pemerintah pusat yang dihadapkan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam kepentingan serta kebutuhannya yang memiliki peranan yang strategis.

Dalam memilih metode yang akan digunakan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak mengatur serta memberikan kebebasan dalam memilih metode yang dibutuhkan untuk menyusun

laporan keuangan. Hal ini dapat di manfaatkan oleh perusahaan maupun instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda. Dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi merupakan bagian terpenting. Oleh karenanya dalam penyusunan standar akuntansi mekanisme penyusunan standar akuntansi tersebut haruslah diatur sebaik mungkin agar kebutuhan tiap pihak yang memiliki kepentingan. Seiring berjalannya waktu dan zaman yang mulai berkembang. Standar akuntansi terus mengalami perubahan serta perkembangan hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Secara umum, standar akuntansi diterima sebagai aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan (Belkaoui dalam Mulyani, 2015)

Dalam suatu perusahaan ataupun instansi laporan keuangan sangat penting keberadaannya dikarenakan posisi dari laporan keuangan yang penyajiannya terstruktur dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan yang menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) adalah untuk memberikan serta menyediakan informasi yang memuat mengenai posisi keuangan, kinerja maupun perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan yang sangat bermanfaat untuk beberapa pemakai dalam menetapkan suatu keputusan ekonomi. Agar dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan maka suatu laporan keuangan dapat dikatakan jelas serta layak jika laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) suatu

kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan (Augustyas,2011).

Didalam laporan keuangan juga ditunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen terhadap pemakaian sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Salah satu ini Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dan telah dijadikan untuk melakukan penyusunan serta menyajikan sebuah Laporan Keuangan Pemerintah yang mana terdiri oleh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sementara itu, dalam laporan keuangan pokok yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atal Laporan Keuangan, serta Laporan Arus Kas. Hal tersebut dibutuhkan agar mampu mendapatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan selain itu hal ini sekaligus juga agar mampu memberikan peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Umumnya, SAP merupakan suatu pernyataan yang memiliki judul, nomor, serta tanggal efektif yang berlaku sesuai standar tersebut. Disamping itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang dibuat menjadi rangka penyusunan.

Menurut Munawir 2014:2, suatu perusahaan menggunakan laporan keuangan yang merupakan suatu hasil dari proses akuntansi sebagai alat untuk melakukan komunikasi diantara data keuangan maupun aktivitas dari suatu perusahaan dengan pihak yang memiliki kepentingan dengan data dan aktivitas perusahaan.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) adalah sebuah instansi yang mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya yang merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendukung kegiatan tentang pembangunan sarana dan prasarana permukiman, menyiapkan perencanaan dan usulan anggaran serta meningkatkan efisiensi pendanaan. Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) penerapan standar akuntansi keuangan pemerintah diterapkan untuk mengukur kualitas penggunaan laporan keuangan yang dilaksanakan.

Sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk dapat mengetahui mengenai bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh instansi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Kota Makassar.

Berdasarkan apa yang telah dirincikan di atas, maka dari itu peneliti kemudian mengambil judul penelitian “PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI SELATAN (BPPW SULSEL)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian mengemukakan pokok permasalahannya yaitu bagaimana penerapan standar

akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW SULSEL)?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW SULSEL).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW SULSEL), sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk dikembangkan pada mahasiswa(i) dalam hal peningkatan, pemahaman tentang proses standarisasi keuangan yang sesuai dengan aturan

2. Bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Penelitian ini dijadikan referensi bagi pihak balai prasarana permukiman wilayah khususnya bagi pihak keuangan dalam pembuatan pelaporan keuangan selalu mengikuti aturan dan standar akuntansi pemerintah.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi pihak akuntansi perseroan dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari oleh penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Kerangka teori juga menguraikan tentang teori-teori yang mendukung alat analisis standar akuntansi keuangan dalam penelitian kerangka teori.

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian Akuntansi menurut para ahli yaitu :

American Institute of Certified Public Accountants dalam Suhayati dan Anggadini (2009:1) menyatakan bahwa “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan penringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Selain itu, ada juga pengertian akuntansi menurut beberapa ahli yaitu Surwadjono (2015:10) menyatakan bahwa: “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu

dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.”

Menurut Rudianto (2010:10) pengertian akuntansi adalah: “Akuntansi yaitu aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan”. Proses pengidentifikasian, pengesahan, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut Belkaoui (2006:50) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut: “Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternative yang ada”.

Menurut Kieso (2007:4) yang diterjemahkan oleh Handikad Wasilah yaitu “Akuntansi adalah suatu Sistem Informasi yang mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan”.

Adapun pengertian akuntansi Menurut Walter (2012:3) yaitu “Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.”

Menurut James M Reeve, dkk (2013:9) pengertian akuntansi yaitu “Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan.”

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah Akuntansi yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yang diidentifikasi, catatan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi organisasi untuk kepentingan pengguna. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengannya bisnis dan kemudian mencatat peristiwa-peristiwa itu untuk memberikan sejarah aktivitas keuangan. Pencatatan terdiri dari menjaga sistematis, catatan harian kronologis peristiwa, diukur dalam dolar dan sen. Akhirnya, mengomunikasikan informasi yang dikumpulkan kepada pengguna yang menarik dengan cara laporan akuntansi disebut laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi Keuangan adalah rumpun ilmu dari akuntansi yang berhubungan dengan cara pelaporan perusahaan kepada pelaku ekonomi baik secara internal maupun eksternal yang biasanya laporan berbentuk arus kas, perubahan modal, rugi laba dan neraca.

Akuntansi keuangan mempunyai peran yang begitu penting dan utama dalam menyajikan laporan kondisi terbaru perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian Akuntansi Keuangan menurut para ahli yaitu :

Berdasarkan Akuntansi Keuangan Sugiarto (Pengantar Akuntansi:2002), adalah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan ialah Aset sama dengan Ekuitas ditambah Liabilitas yang berpatokan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.

Menurut Warren Reeve Fess (2008:15) pengertian mengenai Akuntansi Keuangan ialah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik (owner), kreditur, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Selanjutnya, Menurut Donald E. Kieso, etal (2008:2), “Akuntansi Keuangan ialah sebuah proses yang berujung pada pembuatan laporan keuangan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai baik oleh pihak-pihak internal maupun oleh pihak eksternal.”

Bidang akuntansi keuangan dilihat dari sisi pengguna informasi dibagi menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam penulisan laporan akhir ini penulis berfokus pada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Penjelasan mengenai akuntansi keuangan menurut Martani (2012:8) Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Bermacamnya pihak eksternal dengan tujuan mendetail bagi masing-masing pihak membuat laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang bias dijadikan acuan baik oleh penyusun maupun oleh penerima laporan keuangan. Laporan yang disajikan dari akuntansi keuangan ialah laporan keuangan untuk keinginan umum dengan Bahasa lain *general purpose financial statement*.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3), “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berekspentingan.”

Berdasarkan pengetahuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi keuangan adalah mempunyai peran yang begitu penting dan utama dalam menyajikan laporan kondisi terbaru perusahaan atau instansi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan atau instansi.

2.1.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa

Laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2010:134) adalah:

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Secara umum, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbentuk pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif, berlaku standar tersebut. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi : § diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan pemerintah di Indonesia”.

Adapun, Menurut Wijaya (2008:4) yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *Stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Menurut Sianaga (2010:8) yaitu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan *audit*.

Menurut Halim (2013:38) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan

keuangan pemerintah kepada pihak legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Lingkup akuntansi pemerintahan adalah:

- a. Akuntansi Pemerintahan Pusat
- b. Akuntansi Pemerintahan Daerah, terdiri atas:
 1. Akuntansi Pemerintah Provinsi,
 2. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu usaha untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan

Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pemaparan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2.1.1.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diyakni akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Informasi keuangan pemerintahan akan dapat

menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Menurut Fakhurrazi (2010:15) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *Stakeholders*.

Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.1.1.5 Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah, oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih setelah telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat

diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum Laporan Keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan.

Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat.

Jika melihat dari penjelasan di atas tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan di pertanggung jawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan.

Dalam penyusunan laporan keuangan ini memakai berbagai sumber data dalam pembuatannya. Seperti (faktur, bon, nota kredit, laporan, bank dan lain sebagainya).

Menurut Lubis (2017:13) Definisi Laporan Keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, *Financial Statement* merupakan rangkaian yang menunjukkan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan yaitu guna memberikan informasi mengenai

posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*) serta arus kas (*cash flow*). Dalam meraih tujuan ini, pada laporan keuangan harus berisikan elemen yang terdiri atas aset, kewajiban, beban, networth, pendapatan dan juga perubahan ekuitas serta arus kas.

- a. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 Tahun (2015:1) “Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.
- b. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2), “Bagian dari proses laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana). Catatan dan laporan ini serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”
- c. Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara). Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:12), Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen.

2.1.2.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat,
- b. Pemerintah Daerah,
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat,

- d. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

2.1.2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen Laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Keuangan pemerintah yang pertama yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Secara detail, jenis laporan keuangan pemerintah mengandung 4 unsur, antara lain:

1. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya, yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja, semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 3. Transfer, penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.
 4. Pembiayaan, setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, laporan ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam PSAP Nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, sebagai berikut:

1. Saldo anggaran lebih awal
2. Penggunaan saldo anggaran lebih

3. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5. Lain-lain
6. Saldo anggaran lebih akhir

c. Neraca

Jenis laporan keuangan pemerintah yaitu laporan neraca, di dalam laporan neraca ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya antara lain:

1. Asset, sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar dapat dikur dalam suatu uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban, utang yang terjadi dari kejadian di masa lalu penyelesaiannya mengakibatkan terjadinya aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas, kekayaan bersih pemerintah yang dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat

atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Berikut masing-masing unsur laporan operasional, antara lain:

1. Pendapatan Laporan Operasional, hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban, kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer, penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos: Ekuitas awal, Surplus atau defisit hello pada periode bersangkutan, Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya, Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.2.4 Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, fungsi laporan keuangan sebagai berikut:

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu laporan entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangan-undangan.

Beberapa Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memerikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)**

Mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.2.5 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 adalah

untuk “menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.”

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan
- b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang telah ditetapkan.

Atas peranan laporan keuangan pemerintah tersebut, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan keuangan pemerintah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah apakah sumber daya diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam *Statement of Financial*

Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* mengisyaratkan bahwa informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika informasi yang termuat didalamnya, sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan pemerintah.

b. Andal

Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.

Karakteristik informasi yang andal antara lain sebagai berikut:

1. Penyajian Jujur, yaitu jika informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), yaitu jika Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara menyeluruh.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala kendala dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, yaitu:

- a. Materialitas, walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selama seluruh informasi yang material telah disajikan dalam laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang mengakibatkan mungkin saja ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah diperbolehkan untuk tidak menyajikan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi atas biaya dan manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang matang. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi tersebut mungkin saja dinikmati oleh pengguna lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi.
- c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi, menyebabkan

informasi tersebut kurang relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal.

2.2 Kerangka Pikir



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW SULSEL) Kota Makassar yang terletak di Jl. Penjernihan Raya, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian. Adapun waktu penelitian yang direncanakan yaitu selama kurang lebih empat bulan, dimulai dari bulan Februari hingga bulan Mei 2021.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti kepada narasumber yang merupakan operator SAIBA, bagian laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung secara terstruktur kepada narasumber yang merupakan operator SAIBA, bagian laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
- c. Teknik Dokumentasi, yaitu berupa catatan laporan keuangan tahun 2020 yang telah dibuat oleh operator SAIBA, bagian laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Jenis Data

Jenis data menurut sifatnya ada 2 yaitu, Kualitatif dan data Kuantitatif (Ulung:2016). Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau bentuk uraian
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Data yang berisikan informasi mengenai pencatatan-pencatatan atas transaksi keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) pada tahun yang berjalan yang diperoleh dari pengelola mempunyai peran penting dalam mengenai data-data keuangan dan setiap transaksi yang terjadi pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber tidak melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis pada operator SAIBA, bagian laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau data yang sudah melalui pengelolaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Balai Prasarana permukiman wilayah.

3.4 Metode Analisis

Data yang berhasil dikumpulkan, disusun, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan perbandingan laporan keuangan yang sudah sesuai dan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan bentuk deskriptif.

3.5 Definisi Operasional

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pemaparan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat di simpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan

prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Adapun indikator penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu Regulasi harus sesuai dengan kebijakan, Sistem dan Sarana Pendukung harus memadai dan Sumber Daya Manusia yang paham dan mampu menjelaskan standar akuntansi tersebut.

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat,
- b. Pemerintah Daerah,
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat,
- d. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Adapun indikator penyusunan laporan keuangan pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, jelas dan akurat, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Karena kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik jika laporan keuangan yang disajikan dapat di andalkan dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan standar yang berlaku, mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Sejarah Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Pada Peraturan Menteri (Permen) Nomor 05/PRT/M/2019 di jelaskan mengenai organisasi serta tata kerja suatu unit pelaksanaan yang terkait di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan peraturan Pemerintah (Permen) PUPR Nomor 05/PRT/M/2019 telah dibentuk 34 Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Berdasarkan Keputusan Dirjen Cipta Karya Nomor 14/KPTS/DC/2019 telah ditetapkan 102 Pejabat Pengawas di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW). Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1104/KPTS/M/2018 telah ditetapkan Pejabat Perbendahraan, terdiri dari 41 Satker Wilayah dan 198 PPK Satker Wilayah.

Pembentukan Balai Prasarana Permukiman wilayah (BPPW) mendukung pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya Perumahan Rakyat dan di Kementerian Pekerjaan Umum urgensinya adalah sebagai berikut:

1. Program pembangunan Bidang Cipta Karya meningkatkan kapasitas organisasi dengan secara *Structural* menjamin semua akan efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan pembangunan Cipta Karya dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah. Peningkatan hubungan harmonis antara pusat dan daerah, sehingga mewujudkan percepatan, efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan pembangunan.

Pembentukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05 Tahun 2019 pasal 133 bagian ketiga, Pembentukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 34 Provinsi di Indonesia dan diubah Peraturan Menteri PUPR No 13/PRT/M/2020. Filosofi pembentukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) adalah :

1. Pemerintah pusat sebagai perwakilan untuk mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah,
2. Pelaksanaan program perasarana permukiman secara sinkronisasi,
3. Melaksanakan pembinaan,
4. Fasilitas dan konsultasi teknis kepada pemda,
5. Mempersiapkan perencanaan serta usulan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dalam pendanaan. “ *1 Cipta Karya, Cipta Karya I*”

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan terbentuk pada Tahun 2019 dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Kementerian PUPR, sebelumnya Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari 5 (Lima) satuan kerja yang berkedudukan di Provinsi, yaitu: Satker Randal (Perencanaan dan Pengendalian), Satker PSPLP (Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulsel), Satker PBL (Penataan bangunan Lingkungan Provinsi Sulsel), Satker PSPAM (Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum Provinsi Sulsel), satker PKP (Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulsel).

4.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Tugas-tugas dan fungsi yang dilakukan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah sebagai berikut :

1. Penyusunan pemrograman, rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana permukiman,
2. Penyiapan teknis dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman,
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur permukiman,
4. Pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan social,
5. Fasilitas pengadaan lahan dan serah terima asset,
6. Pelaksanaan administrasi Balai.

4.1.3 Kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Kegiatan yang dapat dilakukan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah yaitu:

- a. PKP (Pengembangan Kawasan Permukiman)
 7. Perkotaan (Kumuh)
 8. Perdesaan (Agropolitan, Minapolitan)
 9. Khusus (Kws Parawisata)
 10. Pemberdayaan (Kotaku, Pisew)
- b. PBL (Penataan Bangunan dan Lingkungan)
 1. Ruang Terbuka Hijau
 2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 3. Pengelolaan Rumah Negara

- c. PPLP (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman)
 - 1. Air Limbah (IPAL, IPLT)
 - 2. Persampahan (TPA, TPS3R)
 - 3. Drainase Lingkungan
 - 4. Pemberdayaan (Sandes)
- d. PSPAM (Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)
 - 1. Pembangunan SPAM
 - 2. Optimalisasi SPAM IKK
 - 3. Pemberdayaan (Pamsimas)
- e. PSPP (Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan)
 - 1. Rehabilitasi & Renovasi SD/SMP
 - 2. Pembangunan & Rehabilitasi PTN/PTAIN
- f. PSPOP (Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pasar)
 - Pembangunan & Rehab Pasar
- g. PM (Pelayanan Manajemen)
 - Administrasi Perkantoran

4.1.4 Visi dan Misi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Visi dan Misi Balai Prasarana Permukiman Wilayah sebagai berikut :

- a. Visi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum,

pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.

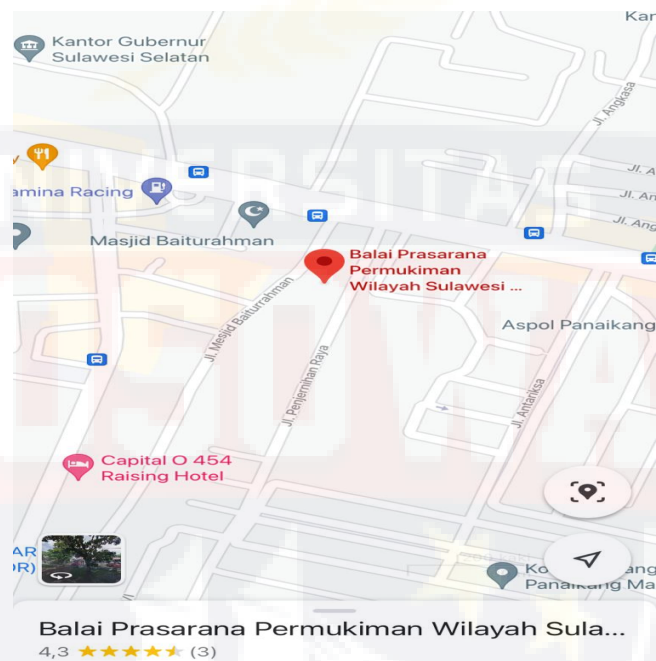
b. Misi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

1. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya.
3. Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan.
4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
5. Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

6. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional, serta pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip good governance.

4.1.5 Lokasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Susel



Sumber: Google Maps (2021)

Lokasi Instansi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Susel ini berlokasi di Jl. Penjernihan Raya, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231.

4.1.6 Struktur Organisasi

Kepala Balai	: Dr. Ir. H. Ahmad Asiri, M.Si
Kasubbag Umum & Tata Usaha	: Chaeriah, SE
Bendahara	: Imelda Gobel, S.Kom

melaksanakan pra penelitian, peneliti dapat melakukan observasi agar dapat menentukan jumlah subjek yang diperlukan sesuai dengan indikator dari setiap variabel yang ada.

Dalam hasil wawancara ini, dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan yang menjadi objek di dalam hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 21 April 2021 dan dilaksanakan dengan mengambil beberapa informan yang terdiri dari beberapa pegawai instansi tersebut. Proses wawancara dilakukan dengan berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh peneliti dan menyesuaikan jam kerja informan. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil 2 informan yang terdiri dari pegawai instansi operator SAIBA, bagian laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel. Pra informan ini dipilih berdasarkan pada hasil wawancara yang telah disetujui oleh peneliti.

4.3 Proses Wawancara

Proses wawancara dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan bersama antara peneliti dan informan dimana tempat dan waktunya bersamaan dari satu informan ke informan lain. Tempat wawancara dilaksanakan di kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dan wawancara dilaksanakan paling lambat 11 menit an setiap informan sedangkan wawancara paling cepat sekitar 10 menit. Pada berlangsungnya wawancara peneliti menunggu sekitar 1 menit, untuk mempersiapkan kata-kata yang digunakan oleh informan menjawab pertanyaan dari peneliti. Cara ini dapat membuat informan dan peneliti bisa dengan nyaman melakukan sesi wawancara.

4.4 Hasil *Interview*

4.4.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1.1 Wawancara Dengan Pegawai Operator SAIBA Bagian Laporan Keuangan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel

- a. Bagaimana Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Mengenai strategi itu berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan & lembaga, jadi memang sudah ada standar dari pusat Kementerian Keuangan mengenai penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah maupun di Kementerian Keuangan dan Lembaga lainnya”.

Berdasarkan dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan pada penyusunan laporan keuangan dan lembaga telah ditentukan oleh PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan & lembaga. Sebagai acuan pokok dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

- b. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : “Untuk sekarang ini sudah berjalan dengan baik, karena sudah dengan standarnya dan telah diterapkan sesuai dengan PMK yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Lembaga”.

Dengan mempermudah penerapan standar akuntansi pemerintah telah diterapkan sesuai dengan PMK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

dan Lembaga sudah berjalan dengan baik sehingga penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan.

- c. Apakah tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah?

Jawaban : “Sangat pengaruh dan semakin bagusnya sumber daya manusia yang ada maka semakin berkembangnya laporan keuangan yang akan di buat oleh balai tersebut”.

Kualitas Sumber daya manusia ahli dalam bidangnya, menunjukkan semakin baik pemahaman pekerja dalam menyusun laporan keuangan, dan semakin baik pula hasil serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

- d. Bagaimanakah alur dan gambaran penerapan system standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Balai sendiri mengikuti PMK itu sendiri”.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan Balai Prasarana Permukiman Wilayah mengikuti peraturan yang telah di ikuti oleh PMK dalam penyusun laporan keuangan.

- e. Bagaimana pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?

Jawaban : “Pengawasannya kita lakukan setiap bulan yang namanya rekonsiliasi, rekonsiliasi itukan tiap bulan melalui aplikasi SAIBA disitu kita lihat progress penerapan keuangan dari setiap-setiap Satker perbulannya. Setiap bulannya itu nanti ada namanya triwulan yang buat laporan keuangan triwulan, kalau 6 bulan disebut laporan keuangan semester. Nanti setiap semester ada Namanya rekonsiliasi tingkat eselon I di Kementrian”.

Kesimpulannya dilihat dari progress dari hasil laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah menindak lanjutin tiap bulan dengan melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan yang telah dibuat.

- f. Apa saja kendala yang ditemui dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Kendalanya itu dari penginputan awal, biasa ada kesalahan akun biasanya akunnya berbeda di inputnya jg berbeda jadi keluarannya nanti aplikasi itu beda nilai sehingga kalau ada penerimaan rekonsiliasi akan terbaca minus atau tidak connect dengan yang ada di aplikasi OM SPAN”.

Salah satu kendala yang ditemukan saat melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah adanya kesalahan dalam melakukan input data dimana input data dilakukan itu salah memasukkan nama atau nomor akun sehingga menyebabkan hasil laporan keuangan yang berbeda dan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/instansi.

- g. Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Bahannya itu ada SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), backup SAS (Sistem Aplikasi Satker)”.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, SPPD dan SAS merupakan dasar dari penyusunan laporan keuangan tersebut.

- h. Laporan apa saja yang disusun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dalam penyusunan laporan keuangan?

Jawaban : “Biasanya kalau laporan rekonsiliasinya perbulan, kalau triwulan dan semester itu namanya CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) 3 bulan dan 6 bulan”.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah, disusun berdasarkan laporan rekonsiliasi perbulan dalam hal ini tiap 3 atau 6 bulan yang biasa disebut trwiulan atau semester yang disebut dengan Laporan CALK (Catatan atas Laporan Keuangan).

- i. Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Semuanya terlibat, yang biasanya digunakan itu SPP (Surat Perintah Pembayaran) dulu baru jadi SPM (Surat Perintah Membayar) nanti dari SPM akan keluar SP II D dari SP II D itu akan diajukan ke aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dari aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) di backup ke laporan rekonsiliasi kementerian keuangan”.

Dalam penyusunan laporan keuangan, tiap unit terlibat dan memiliki peran masing-masing.

- j. Adakah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah?

Jawaban : “kalau SOP kan dari Kementerian Keuangan sedangkan Balai hanya mengaplikasikan SOP tersebut. Jadi tidak ada SOP di Balai hanya menerima Standar Operasional Kementerian Keuangan yang terkait laporan keuangan”.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah tidak menerapkan SOP namun yang ada hanya POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) yang ada didalamnya mengatur dan sebagai petunjuk dalam mengelola kegiatan keuangan dalam menggunakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

4.4.2 Penyusunan Laporan Keuangan

4.4.2.1 Wawancara Ke Dua Dengan Pegawai Operator SAIBA Bagian

Laporan Keuangan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel

- a. Bagaimana strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “di Balai ada yang dibilang Satker, Satker Wilayah I dan Satker Wilayah II. Dari pengalaman saya yang di Wilayah II dengan cara kami mengumpulkan data yang kita kerjakan dilakukan input dengan cara itu kita bisa mengetahui laporan keuangan pencairan perbulan dengan cara input di aplikasi SAIBA, BMN, dan Persediaan. Setelah 3 aplikasi yang kita lakukan lalu masuk ke rekonsiliasi (Internal ke KPPN Makassar) disitu kita bisa melihat nilai atau grafik keuangan kita sampai dimana, dan apa antisipasi kita supaya kita tidak minus, dengan menggunakan aplikasi irekon tiap bulan”.

Untuk mengetahui laporan keuangan pencairan perbulan yang dilakukan, maka Satker Wilayah I dan Wilayah II input yang dilakukan dengan cara menginput aplikasi SAIBA, BMN dan Persediaan lalu setelahnya di rekonsiliasi agar nilai atau grafik keuangan dapat ditampilkan untuk menghindari minus pada laporan keuangan tersebut.

- b. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : “Untuk saat ini alhamdulillah sudah bagus atau baik, karena sudah bisa kami jalankan dan diterapkan berjalan dengan baik yang biasa kekurangannya itu paling bagian operator yang baru yang perlu diajarin dulu. Tapi untuk semua system sudah bagus kita ada arahan dari pusat ya itu yang kami ikuti”.

Penerapan standar akuntansi pemerintah yang dilaksanakan sudah cukup baik dilihat dari penerapannya. Adanya arahan dari pusat membantu dalam

menerapkan dan menjalankan system dengan baik. Selain itu, tidak ada kendala berat dalam menjalankan selain perlunya mengarahkan dan mengajarkan penerapan sistem tersebut kepada operator baru.

- c. Apakah tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah?

Jawaban : “Berpengaruh, dengan adanya sumber daya manusia yang bagus otomatis laporan keuangannya juga bisa berjalan dengan baik pekerjaannya dan dengan pemahamannya tentang laporan keuangan itu bisa dijawab dan menerapkan dengan baik sistem-sistem yang ada pada laporan keuangannya, kalau seumpamanya kecuali petugas operatornya baru maka perlu dipelajari dulu tahap pertahapnya yang berpengalaman dan otomatis sudah bisa mengendalikan, mengatasi masalah dengan cepat bisa di selesaikan. Pasti ada pengaruh dari sumber daya manusia itu sendiri”.

Dari jawaban dan penjelasan diatas, yang menjelaskan tentang tingkat kompetensi berpengaruh dalam lingkungan kerja guna dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar.

- d. Bagaimanakah alur atau gambaran penerapan system standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Alurnya yaitu, mulai dari apa yang kita mau kelolah atau cairkan dari situ kita lihat, dari akun kita ambil masuk ke aplikasi dan proseslah dari situ. Jadi nanti dikerjakan oleh SPM lalu dilaksanakan sama bendahara. Seperti itu alur pengerja laporan keuangannya”.

Dari jawaban narasumber menjelaskan alur atau gambaran mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel yaitu mulai dari yang dapat dikelola atau dicairkan dikerjakan menggunakan aplikasi yang dikerjakan oleh SPM dan lalu dilaksanakan sama bendahara.

- e. Bagaimana pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?

Jawaban : “Dengan melakukan erekon (internal dulu), setelah kita melakukan penginputan bulanan di aplikasi dalam aplikasi tersebut kita transfer ke KPPN Makassar, erekon itu semacam rekonsiliasi keuangan tiap bulan, per triwulan, per semester. Untuk monitoring atau pengawasannya dalam penyusunan laporan keuangannya, setelah tiap triwulan baru langsung di *control* oleh pusat.”

Mengenai pengawasan dan monitoring laporan keuangan dengan melakukan rekonsiliasi keuangan yang dilakukan melalui penginputan tiap bulan, per triwulan, per semester dalam aplikasi lalu ke KPPN Makassar dan di *control* oleh pusat.

- f. Apa saja kendala yang ditemui dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Kendalanya paling seperti *miss communication* semacam antar partner kerja atau ada yang salah input nah di situ kendalanya sementara kita menyelesaikan di aplikasi laporan keuangan kadang kita tidak tau ada kekeliruan atau pada saat penginputan awalnya, atau kendalanya di jaringan pada saat penginput laporan keuangan”.

Dari jawaban diatas kendala yang ditemui dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel seperti kurangnya komunikasi antar partner kerja atau kekeliruan pada saat penginputan awalnya sementara diselesaikan dengan aplikasi laporan keuangan

- g. Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Bahan dasarnya itu pencairan dana nya yang mau dikerjakan, yang dimulai dari pekerjaan fisik”.

Bahan dasar dalam penyusunan laporan keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah berupa seluruh pencatatan mengenai program kerja yang dilakukan atau kata lain apa yang ingin dibangun pada suatu daerah misalnya neraca pada periode yang lalu.

- h. Laporan apa saja yang disusun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dalam penyusunan laporan keuangan?

Jawaban : “Laporannya seperti Neraca, Dana Cetus, Buku Besar, Neraca Percobaan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Belanja dan Laporan Realisasi Pendapatan”.

Laporan yang di buat oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel sama dengan laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah pada umumnya seperti Neraca, Dana Cetus, Buku Besar, Neraca Percobaan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan.

- i. Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?

Jawaban : “Seperti Infentaris Kantor, data-data pekerjaan fisik itu semua sudah termasuk lingkup laporan keuangan yang harus dilaporkan nanti dijelaskan dalam aplikasi SAIBA”.

Unit yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel yaitu infentaris kantor, dan data-data pekerjaan fisik yang telah masuk lingkup laporan keuangan yang harus dilaporkan dan dijelaskan dalam aplikasi SAIBA tersebut.

- j. Adakah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah?

Jawaban : “Dari Balai sendiri tidak mempunyai SOP dalam keseluruhannya namun setiap masing-masing bagian memiliki SOP pada umumnya berbeda seperti bendahara, SPM, Kepegawaian, staf-staf yang lain, karena Balai Prasarana Permukiman Wilayah memiliki yang dinamakan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)”.

Mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) di Balai Prasarana Permukiman Wilayah SulSel tidak mempunyai SOP dalam keseluruhannya, namun Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel memiliki aturan yang dinamakan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) yang didalamnya mengatur dan sebagai petunjuk dalam mengelola kegiatan keuangan dalam menggunakan DIPA (Daftar isian Pelaksanaan Anggaran).

4.5 Pembahasan

Berdasarkan dari hasil yang telah di observasi dan telah di wawancara dilakukan oleh pihak peneliti selama proses penelitian, maka dapat dipahami bahwa dalam menyusun laporan keuangan pegawai bagian keuangan kantor Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel telah mengikuti pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di balai prasarana pemukiman wilayah sulsel dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian di input di aplikasi SAIBA, BMN, dan Persediaan yang kemudian dapat dilihat nilai atau grafik keuangannya dengan

menggunakan aplikasi irekon tiap bulan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sangat berperan baik dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan yang akan dilakukan hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kemampuan sumber daya manusia yang sangat berperan signifikan dalam menyusun laporan keuangan.

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring dalam penyampaian laporan keuangan dilakukan dengan cara data tiap bulan melalui aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya yang kemudian akan di transfer ke KPPN Makassar. Adapun jenis laporan keuangan yang akan disusun oleh pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel ialah Laporannya seperti Neraca, Dana Cetus, Buku Besar, Neraca Percobaan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Belanja dan Laporan Realisasi Pendapatan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam menjalankan tugasnya masing-masing pegawai bagian keuangan Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Sulsel tidak mempunyai SOP dalam keseluruhannya namun masing-masing bagian memiliki SOP pada tiap bagiannya sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Dari hasil observasi ini dapat dipahami bahwa dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel, laporan keuangan disusun telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan

mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan & lembaga, jadi memang sudah ada standar dari pusat Kementerian Keuangan mengenai penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah maupun di Kementerian Keuangan dan Lembaga lainnya. Dimana dalam hal ini data yang telah didapatkan diolah dengan menggunakan aplikasi SAIBA, BMN, dan Persediaan yang dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulse.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan telah dibuat sebaik mungkin, bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Penyusunan Laporan Keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel, diperoleh kesimpulan yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel telah menerapkan atau mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Operator SAIBA bagian Keuangan yang menyatakan bahwa sudah menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan & lembaga, jadi memang sudah ada standar dari pusat Kementerian Keuangan mengenai penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah maupun di Kementerian Keuangan dan Lembaga lainnya. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat dikatakan sudah sesuai karena informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan, sehingga hasil penelitian ini dinyatakan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel telah menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) pada laporan keuangannya. Dimana dalam hal ini data yang telah didapatkan diolah dengan menggunakan aplikasi SAIBA, BMN, dan Persediaan yang dapat mempermudah proses penyusunan laporan keuangan pemerintah milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel.

5.2 Saran

1. Pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel

Setelah mengetahui bahwa laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah maka diharapkan bahwa pihak Balai untuk tetap mempertahankan hal tersebut demi memberikan gambaran atas kepatuhan pemerintah Kota Makassar terhadap standar akuntansi pemerintah.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya sangat diharapkan dapat menambah variabel dalam penyusunan penelitian ini supaya memperdalam Analisa data. Selain itu diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat meneliti di Balai Prasarana Permukiman Wilayah di Kota lain agar dapat membandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Augustyas, Dhika. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.
- Baridwan, Zaki. 2007. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Donald E. Keiso, Jerry J, Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Artikel. <http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standarakuntansi-pemerintahan/>.
- Farid dan Siswanto. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Safri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Harrison Jr. Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Financial Statement* merupakan rangkaian yang menunjukkan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam suatu entitas. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan ETAP*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- James m. Reeve. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Mulyani, Belkaoui, Ahmed Riahi. 2015. *Standar akuntansi akan*

terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan Kasmir. 2013. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta Suhayati, Ely., Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Kieso, E. Donald, 2007, *Intermediate Accounting*, Wiley, New York.

Kieso, *et al.* 2011. *Intermediate Accounting*. (Jilid 1) Edisi ke-12. Diterjemahkan oleh Emil Salim. Jakarta: Erlangga.

Martani, Dwi., Veroinca NPS, Sylvia., Wardhani, Ratna., Farahmit, Aria, Tanujaya, Edward. 2012. *Akuntansi Keuangan menengah*. Berbasis PSAK. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Munawir, (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Sugiarto. (2002). *Pengantar Akuntansi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.

Suwardjono. 2015. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan keuangan*. Yogyakarta : BPEE-Yogyakarta

Sinaga, Jamason. 2010. *Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan*. www.ksap.org

Warren, Reeve, dan Fess. (2008). *Pengantar Akuntansi*, Edisi Dua Puluh Satu, Salemba Empat, Jakarta.

Wijaya, Henryanto. 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP NO.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparansi dan Akuntabel. *Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3*. 313-323

LAMPIRAN

BOSOWA



Lampiran 1. Surat Balasan Meneliti Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel



Nomor : UM 0201-Cb2g/507

Makassar, 14 April 2021

Sifat :

Lampiran :-

Hal : Persetujuan Melakukan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

Di -

Makassar

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar nomor A.351/FEB/UNIBOS/III/2021 hal Permohonan Izin Melakukan Penelitian tanggal 23 Maret 2021, dengan ini diberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar:

Nama : Adinda Annisa Tobo
Stambuk : 45 17 013 023
Program Studi : Akuntansi
No. Tlp/HP : 0858 2301 0442

Untuk melakukan penelitian pada Balai Prasarana Permukiman Sulawesi Selatan dengan judul "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Penyusunan Laporan Keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan"

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala
Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Sulawesi Selatan,

Dr. Ir. H. Ahmad Asiri, M.Si.
NIP. 196511271999031005

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Bagaimanakah strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?
2.	Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan sudah berjalan dengan baik?
3.	Apakah tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah?
4.	Bagaimanakah alur dan gambaran penerapan system standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?
5.	Bagaimana pengawasan dan monitoring penyampaian laporan keuangan yang biasa dilakukan?

6.	Apa saja kendala yang di temui dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah pada penyusunan laporan keuangan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?
7.	Bahan apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel?
8.	Laporan apa sja yang disusun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dalam penyusunan laporan keuangan?
9.	Unit apa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?
10.	Adakah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel dalam pembuatan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah?

Lampiran 3. Hasil Wawancara Penelitian

